

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terpadat di dunia. Saat ini, Indonesia masih menempati posisi keempat sebagai negara dengan populasi terpadat di dunia setelah China, India, Amerika Serikat dan India. Jumlah populasi Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar 260.581.100 juta jiwa (www.worldometers. 2016).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Indonesia 2016

No	Country (or dependency)	Population	Yearly	Net	Area	World
		-2016	Change	Change	(Km ²)	Share
1	<u>China</u>	1.382.323.332	0,46%	6.274.389	9.390.784	18,60%
2	<u>India</u>	1.326.801.576	1,20%	15.751.049	2.972.892	17,90%
3	<u>U.S.</u>	324.118.787	0,73 %	2.345.156	9.155.898	4,40%
4	<u>Indonesia</u>	260.581.100	1,17%	3.017.285	1.812.108	3,50%
5	<u>Brazil</u>	209.567.920	0,83%	1.720.392	8.349.320	2,80%
6	<u>Pakistan</u>	192.826.502	2,07%	3.901.628	770.998	2,60%
7	<u>Nigeria</u>	186.987.563	2,63%	4.785.601	910.802	2,50%
8	<u>Bangladesh</u>	162.910.864	1,19 %	1.915.222	130.172	2,20%
9	<u>Russia</u>	143.439.832	-0,01%	-17.086	16.299.981	1,90%
10	<u>Mexico</u>	128.632.004	1,27 %	1.614.780	1.943.082	1,70%

Sumber www.worldometers.2016

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Agustus 2014, jumlah angkatan kerja yang ada di Indonesia sebesar 121,9 juta orang. Namun, dari jumlah angkatan kerja tersebut, yang bekerja hanya sekitar 114,6 juta orang. Hal tersebut menyebabkan 7,3 juta jiwa orang sisanya termasuk ke dalam pengangguran terbuka (*open unemployment*) atau tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan, Pada bulan Agustus 2014, Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia adalah sebesar 5,94%. Angka TPT tersebut relatif meningkat bila dibandingkan dengan data TPT yang dimiliki BPS pada bulan Februari 2014, yang sebesar 5,70% (www.bps.go.id,2016).

Untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diharuskan adanya upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Antara lain dengan menumbuh kembangkan jiwa Kewirausahaan melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi Kewirausahaan, pemberian akses modal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan lainnya ini disebabkan karena Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari kontribusi para Pengusaha, yang berperan menghasilkan produk-produk inovatif dan menciptakan lapangan kerja baru melalui kreatifitas yang mereka miliki, sehingga menghasilkan nilai tambah yang akan meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB). Kemudian Peran pengusaha sangat penting terutama dalam menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat dengan menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas serta meningkatkan *competitive advantage*

salah satu keputusan *Bali Concord II* adalah diberlakukannya *ASEAN Economic Community* (AEC) pada akhir tahun 2015 yang lalu. AEC adalah yang mengisyaratkan bahwa Asia Tenggara dan China akan menjadi satu pasar tunggal dan basis produksi pada tahun 2015. Artinya, pada tahun tersebut semua *barrier* perdagangan akan diliberalisasi dan dilakukan deregulasi. Semua arus perdagangan akan dibebaskan dari biaya tarif yang selama ini menjadi penghalang perdagangan dan implementasi proteksionisme. Hal ini akan menghadapkan produk Indonesia bersaing secara bebas dan ketat dengan produk asing. Oleh

karena itu, masyarakat perlu diarahkan dan didukung untuk tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja (*job seeker*), namun mampu dan siap menjadi pencipta pekerjaan (*job creator*) yang kreatif dan inovatif

Oleh karena itu, peran Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten di bidang kewirausahaan, akan mampu mendorong persaingan bisnis yang dinamis yang bukan sekedar menghasilkan produk, namun mampu berkreasi dan berinovasi sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat pasar *ASEAN Economic Community (AEC)*. Kualitas tersebut akan mampu meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri sehingga meningkatkan daya saing nasional di tingkat global dengan memanfaatkan berbagai infrastruktur, teknologi dan inovasi. Dengan munculnya para *entrepreneur* yang mampu bersaing di era *ASEAN Economic Community*, maka akan mampu mengurangi beban pemerintah dalam upaya penyediaan lapangan kerja. Selain itu, para pengusaha tersebut berperan dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja karena menciptakan lapangan kerja baru yang mampu mengakomodir kepentingan para pencari kerja (*job seeker*).

McClelland (1969) menyatakan bahwa negara dikatakan makmur apabila memiliki jumlah pengusaha minimal 2% dari jumlah penduduk di negara tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) menargetkan pertumbuhan wirausaha Indonesia sebesar dua persen dari jumlah populasi penduduk atau 6,12 juta orang. Menurut data tersebut, jumlah pengusaha di Indonesia saat ini baru sekitar 1,65% atau jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura yang mencapai 7%, Malaysia 5% dan Thailand 3% (www.menkop.go.id, tanggal 10 maret 2015).

Untuk meningkatkan *Entrepreneur* maka pendidikan kewirausahaan harus di tingkatkan Secara nasional gerakan untuk kegiatan Pendidikan Wirausaha sudah di mulai dari tingkat Nasional Baik Itu melalui pendidikan Formal Non Formal dan Informal, Pada Pemerintah Presiden Suharto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK). Instruksi ini mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengembangkan program-program kewirausaha Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengkampanyekan Gerakan Nasional Kewirausahaan (GKN) yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Februari 2011. Gerakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat dan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat, terutama dari generasi muda terdidik kalangan sarjana. Langkah ini merupakan langkah nyata dalam memecah isu strategis tentang pengangguran terdidik (Instruksi Presiden,1995)

Lembaga pendidikan pun bersemangat membentuk wirausaha baru dan memasukkan kewirausahaan ke dalam kurikulum mata ajarnya Dalam implementasi program pendidikan ke- wirausahaan,terdapat dua kebijakan terkait dengan kewirausahaan, yaitu: 1) kewirausahaan sebagai mata pelajaran di tingkat pendidikan menengah,dan sebagai mata Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, serta 2) kewirausahaan sebagai keahlian yang mengacu pada standar kompetensi (Depdiknas, 2010).

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik Kota Padang, menunjukkan jumlah Penduduk angkatan kerja, penduduk bekerja, jumlah pengangguran, dan bukan Angkatan kerja Kota Padang Tahun 2011-2015 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja,
Berkerja Pengangguran, dan Bukan Angkatan Kerja
Kota Padang Tahun 2006 – 2015

NO	Tahun	Jumlah Penduduk	Angkatan Kerja		Bekerja		Pengangguran		bukan Angkatan Kerja	
		(Orang)	(Orang)	%	(Orang)	%	(Orang)	%	(Orang)	%
1	2015	902.413	557.781	61,81	482.159	53,43	75.622	8,38	344.632	38,19
2	2014	889.646	527.471	59,29	462.705	52,01	64.766	7,28	362.175	40,71
3	2013	876.678	515.574	58,81	443.424	50,58	72.151	8,23	361.104	41,19
4	2012	854.336	475.780	55,69	421.160	49,29	54.678	6,40	378.556	44,31
5	2011	844.316	480.078	56,86	427.646	50,65	52.432	6,21	364.238	43,14

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Bulan Agustus 2011 - 2015, Badan Pusat Statistik kota padang

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, jumlah pengangguran di Kota Padang telah mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Data diatas memperlihatkan jumlah penduduk jumlah 844.316 angkatan kerja 475.780, jumlah yang berkerja 427.646 dan jumlah pengangguran pada tahun 2011 sebesar 52.432 orang (6,21%), pada tahun 2012 jumlah penduduk jumlah 854.336 jumlah angkatan kerja 475.780, jumlah pengangguran 54.678 orang secara persentase mengalami kenaikan (6,40%), kemudian naik lagi pada tahun 2013 menjadi 72.151 orang (8,23%).

Namun pada tahun 2014, dengan jumlah angkatan kerja 527.471, terjadi peningkatan jumlah pengangguran menjadi 64.766, walaupun menurut persentase terjadi penurunan menjadi 7,28% dikarenakan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2015, jumlah pengangguran kembali meningkat baik secara jumlah ataupun secara persentase menjadi 75.622 orang atau 8,38%, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 178.926 orang (8,02%). Kemudian jumlah pengangguran menurun kembali pada tahun 2012 menjadi 148.524 (6,65%). Ini diakibatkan oleh penurunan ekonomi sehingga ada beberapa perusahaan melakukan pengurangan karyawan seperti perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan leasing

Tabel 1.3
Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Padang Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2011-2015

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2011		2012		2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sekolah Dasar	4	0,06	5	8,65	18	0,12	68	0,39	66	0,36
2	SLTP	184	2,97	93	22,52	142	0,95	92	0,52	88	0,48
3	SMU/SMK	4.029	65,05	7.066	33,97	6.046	40,43	6.047	34,29	5.712	31,17
4	Diploma I, II, III/ Akademi	736	11,88	1.602	3,89	2.269	15,17	2.859	16,21	6.273	34,24
5	Universitas	1.241	20,04	4.019	7,78	6.479	43	8.569	48,59	6.184	33,75
	Total	6.194	100,00	12.785	76,81	14.954	100,00	17.635	100	18.323	100,00

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Bulan Agustus 2011 - 2015, Badan Pusat Statistik kota padang

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, jumlah pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar memiliki latar belakang lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sebagian besar pencari kerja merupakan lulusan SMA

(baik Umum maupun Kejuruan) yang memiliki kontribusi antara 35 - 65% jumlah pengangguran selama tahun 2011-2015.

Data menunjukkan bahwa tingkat pencari kerja yang berasal dari Universitas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, pencari kerja lulusan universitas sebanyak 1.241 orang atau 20,04%. Kemudian pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 4.019 orang tetapi berdasarkan persentase mengalami penurunan sebesar (7,78%) pada tahun 2013 mengalami kenaikan baik dari segi jumlah dan persentase menjadi 6.476, dan dari segi persentase menjadi 43% diakibatkan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Kemudian pada tahun 2015, jumlah pencari kerja di Kota Padang dari lulusan universitas kembali mengalami peningkatan menjadi 8.569 orang (48%) pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 6.184 atau 33,75%..

Keterbatasan pasar kerja dan tuntutan kemampuan personal yang semakin tinggi menyebabkan semakin sulit untuk memenangkan persaingan dalam mencari pekerjaan sehingga akan mempertinggi angka pengangguran, dari jumlah pengangguran 7-20% yang ada di Kota Padang merupakan pengangguran terdidik lulusan perguruan tinggi, ini merupakan dilema bagi perguruan tinggi, Salah satu upaya untuk mengantisipasi persaingan serta membangun interpersonal skill yang baik dalam diri seorang mahasiswa adalah melalui penanaman dan perubahan mindset, yang diharapkan dapat diwujudkan dalam Pendidikan kewirausahaan. Untuk itu fokus kebijakan strategis peningkatan lulusan Perguruan Tinggi harus bergeser kearah lulusan yang mempunyai wawasan wirausaha, agar mereka berani dan mampu membuka usaha sendiri. Melalui wadah ini mahasiswa diharapkan dapat digiring untuk merubah dirinya sendiri melalui pemberian

pemahaman tentang potensi diri yang bersangkutan dan mengembangkannya menjadi suatu kegiatan yang profitable, Penerapan semua ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional diharapkan dapat mendukung segala upaya untuk memecahkan masalah pendidikan yang pada gilirannya akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap masalah-masalah makro Kota Padang. Oleh sebab itu semua lapisan masyarakat yang terkait dengan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung baik sebagai konseptor, pengambilan kebijakan, pelaksanaan, maupun masyarakat hendaknya memiliki pemahaman yang baik terhadap isi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, dengan kesetaraan pemahaman tersebut seluruh upaya pendidikan nasional akan mendapatkan dukungan dari segala penjurur dan hal ini akan menjamin keberhasilannya

Pengembangan kewirausahaan di Kota Padang telah memperoleh perhatian dari berbagai pihak, baik pihak Pemerintah, Akademisi, Swasta, BUMN, dan para pengusaha, baik itu melalui Pendidikan *formal, nonformal dan informal* Kebijakan ini sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, pasal 13 menyebutkan jalur pendidikan itu dibagi menjadi pendidikan *formal, nonformal dan informal*, Pendidikan *formal* kewirausahaan di Kota Padang di laksanakan oleh para akademisi universitas baik itu negeri atau swasta di Kota Padang, Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi negeri tertua di luar Jawa dan memiliki 15 fakultas, tidak dapat dipungkiri telah dapat menghasilkan ribuan alumni yang telah berkiprah baik di sektor swasta maupun pemerintahan, bahkan banyak di antara mereka telah tumbuh dan berkembang sebagai profil-profil wirausahawan yang tangguh dan dinamis, awal tahun 2000 Pimpinan

Universitas Andalas telah mengembangkan pikiran bahwa pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa harus merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem pendidikan tinggi. Pemahaman ini kemudian melahirkan kebijakan bahwa mulai tahun 2001 mata Pendidikan kewirausahaan dimasukkan di dalam kurikulum semua Program Studi di Universitas Andalas.

Selain pendidikan *formal* Kewirausahaan yang di berikan di Kampus – Kampus di Kota Padang. Pendidikan *Non Formal* juga disiapkan oleh pemerintah Kota Padang melalui Balai Latihan Kerja Kelas 1 Padang, Berdiri pertama kali pada tahun 1969 dengan nama Pusat Latihan Kejuruan Industri (PLKI) Padang diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja Laksamana Mursalin yang merupakan unit pelaksana teknis pada lingkungan Kantor Daerah Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat terletak di Jalan Padang Baru No.81, Kota Padang tahun 1982 Memperoleh bantuan peralatan dari IBRD dan pindah lokasi ke Jalan Sungai Balang Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan dengan nama Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Padang oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. Harun Zain, kemudian tahun 1986 Berubah nama menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) Padang. Pada tahun 1996 nama BLK Padang diubah menjadi Balai Latihan Kerja Khusus Perdagangan (BLKKP) Padang yang diresmikan oeh Menteri Tenaga Kerja Drs. Abdul Latief. Kemudian tahun 2012 UPTD BLKKP Padang berubah nama menjadi UPTP Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Padang dibawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihandan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Serta di tahun 2015 Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 21 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Bidang Pelatihan Kerja BLKI Padang berubah nama menjadi Balai Latihan Kerja Kelas 1 Padang (www.blkpadang.com, 2017).

Sesuai dengan Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 26 yang menerangkan bahwa Pendidikan *nonformal* meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/ atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan *nonformal* kewirausahaan yang dilakukan oleh pihak di luar sekolah formal di kota padang berupa pelatihan akan berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembangkan misi organisasi apabila para pengelola program pelatihan memperhatikan prinsip dasar dan karakteristik kebutuhan organisasi serta kebutuhan individu atau kebutuhan masyarakat sebagai dasar pengelolaan program pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan latihan. Selain itu output yang diharapkan dari pendidikan dan pelatihan itu pun harus dapat mencetak lulusan yang siap guna dan tidak tergantung pada terbatasnya lapangan kerja yang ada, dengan kata lain lulusan tersebut harus siap mandiri.

Kegiatan pendidikan *non formal* pendidikan kewirausahaan dalam bentuk Diklat mampu bertahan dan berhasil melaksanakan proses pembelajarannya dalam pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. bukti keberhasilan dari lembaga BLKI Kota Padang ini adalah para peserta Diklat yang telah selesai mengikuti pendidikan

dan pelatihan di lembaga BLKI Kota Padang ini bekerja dengan baik sesuai dengan program latihan yang ditetapkan sehingga lulusan akan dapat bekerja pada perusahaan dan mandiri atau wiraswasta.(www.blkpadang.com,2017).

Keberhasilan yang dicapai BLKI dalam menghasilkan lulusan yang sudah bekerja tentu saja didukung oleh gambaran BLKI itu sendiri, seperti kelengkapan sumber belajar, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, instruktur yang profesional, dan proses pembelajaran yang dilakukan. Dalam melaksanakan pembelajaran tidak terlepas dari beberapa komponen, seperti: materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, sarana dan prasarana serta evaluasi pembelajaran.

Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 27 tentang pendidikan *informal*, menerangkan bahwa Kegiatan pendidikan *informal* yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, Mata Pendidikan kewirausahaan diberikan dalam bentuk Pendidikan umum ataupun dalam bentuk konsentrasi program studi. Sedangkan bentuk kursus wirausaha yang diselenggarakan di Amerika Serikat di antaranya berusaha keluar dari kelaziman sebuah pendidikan *formal*. Lembaga kursus tersebut menyajikan materi, menetapkan tujuan, dan menyelenggarakannya secara berbeda dengan pendidikan kewirausahaan yang disajikan lembaga pendidikan *Formal*, Pendidikan kewirausahaan *informal* lainnya yang dikenal oleh masyarakat dunia yaitu *action coach* yang digagas dan dikomandani oleh Brad Sugar (2012) Setelah itu, Robert T Kiyosaki (2001) juga telah mempopulerkan pentingnya berwirausaha dengan mempopulerkan konsep *cashflow quadran* Bagi negara Indonesia, *urgensi*

pengembangan kewirausahaan dan pendidikan kewirausahaan antara lain karena jumlah penduduknya besar, dengan sebagian besar penduduknya adalah angkatan kerja, dan dari jumlah itu adalah tenaga muda dari alumni perguruan tinggi. Jumlah penduduk yang tinggi bisa merupakan potensi jika sebagian penduduk itu merupakan SDM yang berkualitas baik, tetapi bila tidak, jumlah penduduk yang besar itu akan menambah beratnya beban pembangunan.

Selain pendidikan kewirausahaan di sekolah atau melalui lembaga pendidikan Formal, upaya menciptakan pengusaha atau calon wirausaha dapat pula melalui lembaga pendidikan *informal* serta pelatihan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu oleh suatu lembaga. Pendidikan *informal* adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik di lembaga maupun tidak. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan Informal lebih terbuka, tidak terikat, dan tidak terpusat. Program pendidikan *nonformal* dapat merupakan lanjutan atau pengayaan dari bagian program sekolah, pengembangan dari program sekolah, dan program yang setara dengan pendidikan sekolah. Dalam pengertian sebenarnya proses pendidikan tidak dapat diartikan secara sempit yaitu proses mendidik di dalam gedung sekolah.

Sejak tahun 2000 pendidikan kewirausahaan *informal* telah banyak di Kota Padang di antara lain seminar seminar kewirausahaan yang diadakan oleh *Enterprneur University* yang di dirikan oleh Purdie Candra pemilik Primagama Group dimana *Entrepreneur* memberikan pendidikan kewirausahaan dalam bentuk seminar yang setiap angkatan terdiri dari 8 kali pertemuan, setiap pertemuan pendidikan ini diajar oleh seorang mentor, mentor merupakan seorang praktisi usaha yang mau berbagi pengalamannya bagaimana ia memulai usaha, bagaimana

ia mengatasi permasalahan dan tips tiips dalam berusaha, selain dari *Entrepreneur University* juga ada Akademi Pengusaha Muslim Indonesia, Komunitas Tangan Diatas dan lain

Kota Padang juga mempunyai Pendidikan kewirausahaan *informal* yaitu sebuah lembaga yang juga disebut Sekolah Dagang Minang dipeluncuran pada Selasa tanggal 2 Agustus 2016 di Auditorium Gubernur Sumbar yang dinamakan *Minangkabau Business School And Entrepreneurship*. Latar belakang pendirian *Minangkabau Business School And Entrepreneurship* adalah Secara historis masyarakat Minangkabau mempunyai budaya kewirausahaan dan sudah dikenal sebagai pelaku bisnis perdagangan (saudagar), yang melakukan aktifitas bisnis baik di Ranah Minang/Sumatera Barat, di berbagai lokasi di Indonesia, maupun di luar negeri. Peran bisnis yang dimainkan juga beragam mulai dari pedagang/ saudagar/ pelaku ritel, distributor, dan produsen. Dengan perjalanan waktu, peran-peran tersebut mulai tergerus dan melemah disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya persaingan di era globalisasi dan sistem pendidikan yang cenderung menghasilkan lulusan yang belum siap pakai termasuk di bidang bisnis. Salah satu akibatnya adalah berbagai kekayaan budaya kreatif yang berdimensi bisnis dan potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Sumatera Barat belum dimanfaatkan dengan optimal. Kecenderungan tersebut kemungkinan akan berlanjut terus jika tidak ada upaya sistematis dan terorganisir untuk merevitalisasi naluri, kompetensi, dan peran pelaku bisnis masyarakat Minangkabau khususnya dan Sumatera Barat umumnya.

Institusi-institusi pendidikan - manajemen dan bisnis - terus menerus untuk merespon tantangan ini dengan menawarkan mata Pendidikan – mata

Pendidikan yang menekankan pada menumbuhkembangkan *mind-set* kewirausahaan bagi para mahasiswa. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa Kewirausahaan *skills* akan menyiapkan mahasiswa berkarir lebih baik pada organisasi-organisasi besar dan kecil. Dan upaya memasukkan pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum perguruan tinggi, tidak selalu diimbangi niat mahasiswa untuk melakukan wirausaha. Para lulusan perguruan tinggi masih enggan untuk langsung terjun sebagai wirausahawan, ini terlihat dari beberapa lama waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Keinginan atau intensi berwirausaha yang ada pada diri seseorang tentunya tidak muncul secara instan tetapi melalui beberapa tahapan. Seorang individu tidak memulai bisnis secara reflek, tetapi mereka melakukannya dengan sengaja. *Theory of Planned Behaviour* menyajikan bahwa intensi berwirausaha memiliki tahapan. Sebelum intensi itu muncul mula-mula dalam diri individu tersebut terdapat motivasi atau keinginan untuk menciptakan sesuatu, hal ini mendorong individu untuk sukses. (Ajzen, 1991)

Berdasarkan latar belakang dan urgensi penelitian yang telah dipaparkan tersebut, maka penelitian ini difokuskan untuk ***Menganalisa Pengaruh Pendidikan Formal, Informal dan Non- Formal Kewirausahaan terhadap Niat Berwirausaha di Kota Padang***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh pendidikan *formal* kewirausaha terhadap niat

berwirausaha di Kota Padang ?

- b. Bagaimana pengaruh Pendidikan nonformal kewirausaha terhadap niat berwirausaha di Kota Padang ?
- c. Bagaimana pengaruh Pendidikan *informal* kewirausaha terhadap niat berwirausaha di Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk menguji pengaruh pendidikan *formal* kewirausahaan terhadap niat berwirausaha mahasiswa di Kota Padang
- b. Untuk menguji pengaruh pendidikan *nonformal* kewirausahaan terhadap niat berwirausaha mahasiswa di Kota Padang
- c. Untuk menguji pengaruh pendidikan *informal* kewirausahaan terhadap niat berwirausaha mahasiswa di Kota Padang

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan pendidikan Kewirausahaan dalam rangka pembentukan sikap dan karakter wirausaha sehingga dapat mengubah *mind-set* dan meningkatkan niat Berwirausaha di Kota Padang

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengambilan kebijakan, baik dari kalangan pimpinan universitas, pemerintah, maupun *stakeholder* terkait dalam upaya meningkatkan niat berwirausaha, terutama di kalangan mahasiswa sehingga diharapkan calon lulusan dapat menjadi pengusaha yang memiliki karakter *Kewirausahaan* dalam menghadapi persaingan yang kompetitif.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Konseptual

Konsep Penelitian ini terkait dengan Pendidikan *formal, informal non-formal* Kewirausaha serta Niat Berwirausaha Mahasiswa.

1.5.2 Ruang Lingkup Kontekstual

penelitian ini berfokus kepada Lembaga Pendidikan yang ada di Kota Padang Yang melaksanakan Pendidikan Kewirausahaan Baik itu Pendidikan Formal, Non formal dan Informal yang terdiri dari Mahasiswa Universita Andalas, Peserta Pelatihan BLKI Kota Padang, Peserta *Minangkabau Business School and Entrepreneurship Center (MBS-EC)* di Kota Padang.

\

1.6 Sistematika Penulisan

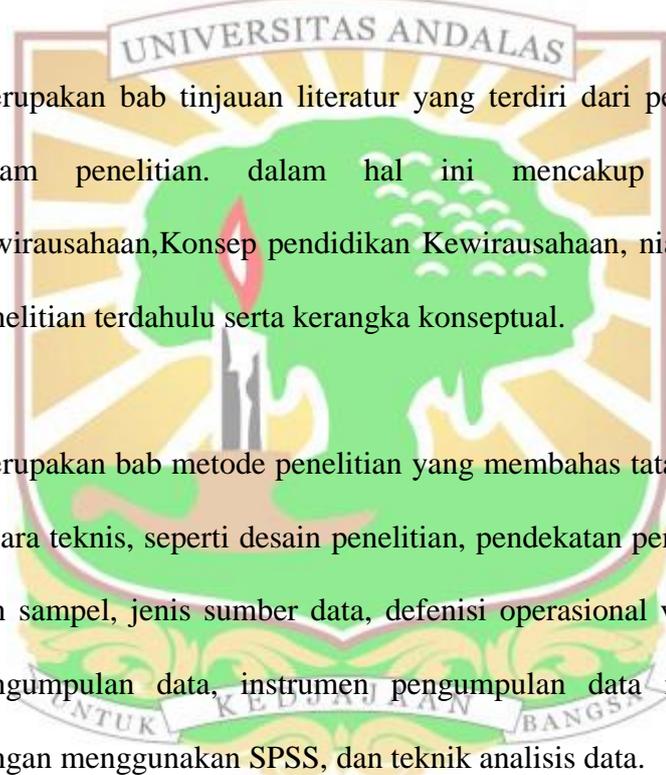
Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan kerangka sebagai berikut :

BAB 1. Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB 2. Merupakan bab tinjauan literatur yang terdiri dari pembahasan teori dalam penelitian. dalam hal ini mencakup teori, konsep kewirausahaan, Konsep pendidikan Kewirausahaan, niat berwirausaha, penelitian terdahulu serta kerangka konseptual.

BAB 3. Merupakan bab metode penelitian yang membahas tata cara penelitian secara teknis, seperti desain penelitian, pendekatan penelitian populasi dan sampel, jenis sumber data, defenisi operasional variabel, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data metode analisis dengan menggunakan SPSS, dan teknik analisis data.

BAB 4. Merupakan bab pembahasan hasil penelitian secara komprehensif. Dengan terlebih dahulu menjabarkan deskripsi responden, membahas pengujian data, hasil pengujian hipotesis yang dilengkapi analisis ilmiah terhadap output penelitian berdasarkan hasil pengolahan data SPSS.



BAB 5. Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Kesimpulan substansial yang didapat dari hasil penelitian ini serta saran yang direkomendasikan untuk berbagai pengambil kebijakan (*stakeholder*) serta peneliti berikutnya terkait topik ini.

